

# Metamorfosis Faksionalisme Internal Partai Golkar di Maluku Utara pada PILKADA 2007

<http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2010.0005>

**Misrina**

Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara . Email:  
*miz\_rina85@yahoo.com.sg*

---

## ABSTRACT

This research describes the dynamics of internal faction of Golkar party when the North Maluku Governor election was held in 2007-2008. It can be observed during the process preelection to the post-election. This research uses the qualitative method The data are collected by conducting the documentation, observation, and interview. The result of this research shows, that the factionalisms occurred in the Golkar party in the election of North Maluku governor caused two factors, the pragmatism of supreme members of Golkar party and the patron-client. The faction characteristic of Golkar party based on the faction fragmentation shows that there are two factions (bipolar), which are the faction supporting Thaib and the faction supporting Gafur.

Keywords: Golkar Party, internal factionalism of political party,

## ABSTRAK

Penelitian ini menguraikan tentang dinamika faksionalisme di internal Partai Golkar pada saat Pilkada (Pemilihan Umum Daerah) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007-2008. Dinamika faksi internal Partai Golkar dilihat dari proses menjelang Pilkada sampai pasca Pilkada. Jenis penelitian ini adalah kualitatif riset. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, observasi dan indept-interview. Hasil penelitian ini menyatakan, faksi yang terjadi di internal Partai Golkar disebabkan oleh dua hal, yaitu pragmatis elit Partai Golkar dan hubungan patron-klien antar-elite yang menyebabkan konflik semakin menguat. Karakteristik faksi Partai Golkar dilihat dari fragmentasi faksi

terpecah mejadi dua kubu (bipolar) yaitu kubu pro Thaib dan kubu pro Gafur.  
Kata Kunci: Partai Golkar, faksionalisme internal partai politik

## PENDAHULUAN

Perkembangan partai politik di Indonesia pasca Orde Baru mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini terlihat dari hadirnya berbagai wajah partai politik baru. Reformasi membuka arena pertarungan kompetisi baru bagi partai politik untuk menegakkan demokrasi di Indonesia setelah sekian lama di tutup oleh rezim yang otoriter. Partai politik sebagai pilar penegakan demokrasi merupakan salah satu yang wajib ada pada negara demokrasi modern untuk mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan masyarakat dan sebagai representatif dari berbagai kalangan. Dilihat dari tingginya pluralitas bangsa Indonesia, partai politik sangat dibutuhkan untuk membawa aspirasi dari setiap perbedaan. Penegakan demokrasi di Indonesia diawali pada pemilu 2004, dimana pertamakali masyarakat Indonesia diberi hak istimewa untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Momentum sejarah perjalanan politik Indonesia yang tidak akan dilupakan serta diikuti berbagai partai politik selain bisa memilih presiden secara langsung, masyarakat Indonesia juga diberi hak untuk memilih anggota legislatif secara langsung.

Pemilihan umum 2004 merupakan gerbang bagi bangsa Indonesia untuk bebas berpolitik dan menegakkan demokrasi. Eforia demokrasi pada Pemilu langsung diramaikan oleh beragam partai politik yang lolos dari berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk partai politik adalah 1) memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jumlah provinsi; 2) memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari jumlah kabupaten/kota di provinsi; 3) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik; 4) pengurus partai politik harus mempunyai kantor tetap serta mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. (Pamungkas, 2009: 105). Melalui persyaratan ini terdapat 24 partai politik yang lolos verifikasi KPU dan dapat menjadi peserta pemilu 2004. Ke 24 partai politik tersebut, 6 diantaranya otomatis ikut dalam pemilu karena jumlah kursi partai melebihi *electoral threshold* atau ambang batas yang telah ditentukan undang-undang. Ke 6 partai itu adalah

PDIP, Partai Golkar, PPP, PKB, PAN dan PBB dan ada beberapa partai lainnya yang merupakan wajah baru dari partai yang ikut dalam pemilu 1999, seperti; PKS dari Partai Keadilan (PK), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dari (PKP) dan partai politik pendatang baru (*new comers*) dalam pemilu 2004, seperti; Partai Demokrat dan Partai Persatuan Daerah dan kemudian turunan dari PPP yaitu Partai Bintang Reformasi.

Kompetisi partai politik dalam Pemilu 2004 tidak terlalu memperlihatkan kompetisi yang ketat, karena kompetisi masih dikuasai oleh partai lama, seperti; Partai Golkar dan PDIP dan disusul oleh partai-partai Islam, seperti; PKB, PPP, dan PAN. Dilihat dari hasil Pemilu 2004, Partai Golkar menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara 21,58%, dan yang kedua dari PDIP 18,53% dan kemudian PKB 10,57%. Peserta Pemilu 1999 dan 2004 pada hakekatnya merupakan keturunan dari partai-partai besar, penyebaran dari tiga partai Orde Baru sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

TABEL 1. PECAHAN PARTAI-PARTAI BESAR PASCA-ORDE BARU

Pemilu	Partai Orba	Pecahan Partai
1999	Golkar	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
		Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
	PDI	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
		Partai Nasional Demokrat (PND)
	PPP	Partai Persatuan (PP)
Partai Persatuan Pembangunan Reformasi (PPP Reformasi)		
2004	Golkar	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
		PGRI
		Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
	PDI/PDIP	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
		Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)
		Partai Indonesia Tanah Airku (PITA)
		Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat (PDPR)
		Partai Nasionalis Marhaenis (PNM)
PPP	Partai Bintang Reformasi (PBR)	

Sumber: Data Primer.

Genealogi tiga partai masa Orde Baru ini memperlihatkan, bahwa Pemilu pasca Orde Baru merupakan perluasan kekuatan tiga partai politik besar yang menemukan jalan baru melalui demokrasi untuk memperkuat posisi partai dalam negara. Tetapi disisi lain, demokrasi yang diperjuangkan pasca Orde Baru membawa pada semakin kuatnya konflik internal partai

masa reformasi ini terlihat pada partai yang berkuasa pada masa Orde Baru, yaitu; Partai Golkar.

Partai Golkar merupakan partai penguasa Orde Baru, *system multy party* terbatas yang terdiri dari tiga partai tapi pada kenyataannya Indonesia menganut sistem partai tunggal karena hanya ada satu partai penguasa, yaitu; Partai Golkar dibawah kekuasaan Soeharto dan ditopang oleh birokrasi dan militer. Golkar merupakan pemenang tunggal setiap pemilu dan hal ini berjalan selama 32 tahun. Pasca runtuhnya Soeharto, Golkar mendapat pukulan terberat karena aktor utama Golkar telah tumbang dari kursi kekuasaan. Sejak reformasi, partai yang pernah berkuasa mutlak dalam pemerintahan ini menjadi semakin bergejolak dengan konflik internal dan kemudian terpecah menjadi beberapa partai setelah rezim Orde Baru yaitu PKP dipimpin oleh Edi Sudrajat, Partai MKGR dipimpin oleh Hj. Mien Sugandhi, dan PKPB dipimpin oleh R. Hatono.

Hal yang menarik untuk dilihat adalah gambaran mengenai perkembangan Partai Golkar pasca Orde Baru. Partai Golkar menghadapi tekanan dari segala arah, baik dari internal maupun eksternal partai. Mereka yang pro reformasi menekankan tuntutan pembubaran partai tersebut, sehingga membuat partai ini harus bekerja keras menghadapi segala tekanan dan hal ini juga memicu menguatnya konflik internal Partai Golkar. Konsolidasi Partai Golkar pada masa reformasi 1998 berlangsung dengan diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk merespon perubahan politik. Musyawarah ini terdapat dua blok dari pihak birokrasi (sipil) di bawah pimpinan Akbar Tandjung dan blok militer di bawah pimpinan Edi Sudrajat yang kemudian hasil musyawarah dimenangkan oleh Akbar Tandjung dari kelompok sipil yang pro reformasi. Pasca Munaslub, banyak elit-elit Partai Golkar yang pecah dan mendirikan partai baru termasuk Edi Sudrajat. Partai Golkar tetap berjalan di bawah pimpinan Akbar Tandjung dengan tetap kokoh mempertahankan Partai Golkar sehingga dari peristiwa reformasi ini lahir nama baru dari Partai Golkar menjadi Partai Golkar yang menunjukkan keterbukaan Partai Golkar terhadap proses demokratisasi, kemudian disusul dengan perubahan paradigma baru Partai Golkar.

Eksistensi Partai Golkar masa reformasi terus meningkat di bawah pimpinan Akbar Tandjung. Hal ini dapat dilihat dari hasil Pemilu 1999

dan 2004 dimana Partai Golkar masih tetap eksis dalam memenangkan Pemilu meskipun disisi lain mengalami penurunan dibandingkan masa Orde Baru. Partai Golkar terus melakukan konsolidasi dalam politik kekuasaan negara dengan membuka diri pada proses demokratisasi. Hal ini terlihat pada keterlibatan berbagai kalangan dalam partai. Kalangan yang paling banyak terlibat dalam Partai Golkar adalah kalangan pengusaha, seperti; Jusuf Kalla yang merupakan representasi kelompok pengusaha.

Munas VII Golkar di Bali memperlihatkan adanya faksi-faksi yang terbentuk atas kepentingan politik dari masing-masing basis sosial dari kalangan birokrat dibawah pimpinan Akbar Tandjung, kalangan militer dibawah pimpinan Wiranto dan kalangan pengusaha dibawah pimpinan Jusuf Kalla yang saat itu telah menjabat sebagai wakil presiden. Hasil Munas ini memilih ketua umum Partai Golkar periode 2004-2009, yaitu; Jusuf Kalla. Jusuf Kalla dianggap akan membawa ruang kekuasaan baru bagi Partai Golkar di pemerintahan. Partai Golkar merupakan partai dominan di parlemen, tetapi kalah dalam pertarungan Pilpres 2004. Sehingga untuk menopang penguatan Partai Golkar dalam pemerintahan, Partai Golkar kembali memilih ketua umum dengan mengandeng Wapres Jusuf Kalla sebagai ketua umum partai. Gejolak Partai Golkar semakin bertambah ketika Partai Golkar semakin pragmatis dengan memperlihatkan kontestasi partai politik yang semakin kompetitif untuk mengalang dukungan dalam Pemilu maupun Pilkada.. Pemilu 2009 dengan sistem multipartai dan jalannya proses demokratisasi membuat kemerosotan Partai Golkar. Hasil pemilu 2009 menyatakan Partai Golkar mendapat 14% suara dari 20% hasil suara pada pemilu 2004. Kemerosotan Partai Golkar pun terjadi di daerah-daerah basis massa Golkar yang telah dikuasai oleh Partai Demokrat.

Inklusivisme yang dibawah Partai Golkar saat reformasi, membuat intensitas konflik internal Partai Golkar semakin tinggi, karena semakin banyak kalangan yang masuk dalam partai. Hal ini berarti semakin banyak kepentingan di internal partai dan berdampak pada pengorganisasian Partai Golkar dari level pusat sampai daerah. Hal ini terlihat dari hasil pemilihan kepala daerah langsung sepanjang 2004-2009, dimana Partai Golkar mengalami penurunan. Artinya, semakin banyak kalangan yang

berasal dari beragam basis sosial membuat partai ini semakin bergejolak dengan berbagai kepentingan. Dampak yang muncul kemudian adalah elit Partai Golkar banyak terfragmentasi pada pemilihan kepala daerah langsung, hal ini menandakan bahwa pengelolaan organisasi internal partai tidak berjalan dengan baik sehingga faksi internal Partai Golkar di daerah tidak dapat dikelola secara demokratis.

Terfragmentasinya elit Partai Golkar ini membawa dampak langsung di daerah terkait dengan pemilihan kepala daerah Provinsi Maluku Utara 2007 yang mengalami proses panjang sampai 2008. Adanya pengelolaan faksi yang tidak demokratis pada internal Partai Golkar Maluku Utara disebabkan karena adanya perpindahan elit Partai Golkar ke calon kandidat gubernur Partai Demokrat dan berlangsung pada saat proses penetapan pemenang Pilkada. Masalah ini menarik dikaji karena fragmentasi Partai Golkar di Maluku Utara tidak berlangsung pada awal proses Pilkada atau setelah pilkada, tetapi perpindahan elit terjadi pada saat proses Pilkada berlangsung. Hal ini berbeda dengan konflik di internal Partai Golkar yang berdampak pada perpindahan elit Partai Golkar ke partai yang lain sebelum proses Pilkada berlangsung seperti yang terjadi pada pilkada di Sulawesi Selatan.

Partai Golkar Maluku Utara merupakan partai yang mendominasi lembaga eksekutif daerah ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil pemilu 2004, diketahui Partai Golkar merupakan partai pemenang dengan perolehan suara 22,29%, disusul PDIP (10,60%), PDS (8,74), PKS (8,73), dan PBB (6,53%). Ditingkat kabupaten, Partai Golkar menang di 5 kabupaten dari 8 kabupaten, yaitu; Kabupaten Halmahera Barat (8.54%), Kabupaten Halmahera Tengah (3.98%), Kabupaten Halmahera Timur (8.34%), Tidore Kepulauan (15.84%), dan Sula (18.95%). Tiga kabupaten/kota lainnya, yaitu; Ternate dimenangkan oleh PPKD, Kabupaten Halmahera Selatan dimenangkan oleh PKS, dan Kabupaten Halmahera Utara dimenangkan oleh PDS. Dari sini dapat terlihat peta kekuatan politik Partai Golkar yang mendominasi di provinsi dan kabupaten/kota. Nasib Partai Golkar Maluku Utara tidak sebaik pada saat Pemilu, tetapi dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Maluku Utara 2007 yang diadakan secara langsung, Partai Golkar harus menerima kekalahan seperti yang terjadi pada 2001.

Proses Pilkada menimbulkan masalah yang terkait dengan hasil rekapitulasi suara pada tiga kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat. KPUD Maluku Utara (Malut) sebagai penyelenggara Pilkada tidak dapat menyelesaikan sengketa ini. Akhirnya intervensi pusat untuk menyelesaikan sengketa ini. KPU Pusat pun membuat perhitungan ulang dengan menetapkan Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Rahmi Husen sebagai ketua KPUD Malut tidak tinggal diam atas tindakan yang diambil KPU Pusat dengan menggugat KPU Pusat ke Mahkamah Agung. MA pun merespon gugatan KPU Malut dengan memutuskan penghitungan ulang hasil pilkada Malut di tiga kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat.

KPU Pusat selanjutnya membekukan ketua KPUD Malut dan menggantikan Rahmi dengan Muchlis, tapi sebagai Plt ketua KPUD Malut. Pada Maret 2008 ketua KPUD yang telah dibekukan oleh KPU Pusat melakukan perhitungan ulang di Jakarta dan memutuskan Thaib Armayn-Gani Kasuba sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Muchlis pun mengadakan perhitungan ulang di Ternate dan memutuskan Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo sebagai pemenang Pilkada. Dua hasil pemenang Pilkada yang dihasilkan oleh dua ketua KPUD membuat masalah Pilkada Malut semakin rumit. Kedua hasil perhitungan ini diserahkan kepada Mendagri karena terdapat dualisme hasil pilkada, Mendagri memutuskan untuk menyerahkan ke DPRD Malut untuk menentukan salah satu rekomendasi pemenang Pilkada yang akan disahkan. DPRD Maluku Utara membuat masalah terkait dualisme pemenang Pilkada. Terjadi dua kali rapat paripurna yang diadakan oleh DPRD untuk menanggapi keputusan Mendagri. DPRD terpecah dua kubu, paripurna pertama terdiri dari 20 anggota mendukung keputusan KPUD Muchlis. Tapi dengan memenangkan Abdul Gafur-Rahim Fabanyo sebagai gubernur/wakil gubernur. Paripurna kedua terdiri dari 14 anggota menyetujui keputusan KPUD Rahmi Husen. Kedua hasil rapat paripurna pun diserahkan kepada Mendagri. Akhirnya Mendagri menyerahkan dualisme pemenang pilkada Malut kepada Mahkamah Agung. Juli 2008 Mendagri akhirnya menetapkan pasangan Thaib -Gani sebagai pemenang Pilgub Malut.

Keputusan Mendagri ini didasarkan pada keputusan MA No.3 P/KPUD/2007 tertanggal 22 Januari 2008 dan pertimbangan fatwa MA

No.022/KMA/III/2008 tertanggal 10 Maret 2008 yang menyatakan bahwa keputusan KPU Maluku Utara versi Rahmi Husen dinyatakan telah sesuai dengan prosedur yuridis dan ketentuan hukum acara perdata. Berdasarkan fatwa MA ini, Mendagri juga harus memutuskan pemenang pilkada dengan terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan DPRD Maluku Utara. Hanya saja, rapat paripurna DPRD Maluku Utara, 16 April 2008, yang dimaksudkan sebagai forum penyelesaian sengketa Pilkada tetap memunculkan dua pasangan calon terpilih yang berbeda, karena DPRD juga terpecah menjadi dua kelompok.

Dengan demikian, pemerintah tidak dapat menjadikan hasil rapat paripurna DPRD tersebut sebagai landasan penyelesaian sengketa Pilkada. Pertimbangan hukum kedua adalah Keputusan MA No.099/KMA/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 yang substansinya menyatakan bahwa pemerintah pusat berwenang menyelesaikan persoalan Pilkada Maluku Utara sebagai *beleid* (kebijakan) dan harus dilihat dari sisi manfaat dengan melihat potensi gejolak sosial, politik dan keamanan yang paling minim. Atas dasar pertimbangan hukum MA tersebut, Mendagri akan mengusulkan pembuatan Keputusan Presiden (Keppres) untuk melantik pasangan Thaib Armaiyn dan Abdul Ghani Kasuba sebagai pasangan calon terpilih (Cetro, 3 Juni 2008).

Deskripsi alur konflik Pilkada Maluku Utara diatas adalah titik awal mencuatnya konflik internal Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, dimana terjadi perpindahan elit Partai Golkar, yaitu; Hamid Usman yang sedang menjabat sebagai sekretaris Partai Golkar dan juga ketua fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Maluku Utara ke Partai Demokrat pada saat proses penetapan pemenang Pilkada. Diketahui bahwa calon kandidat gubernur Partai Demokrat, yaitu; Thaib Armaiyn merupakan elit Partai Golkar Provinsi Maluku Utara yang tidak mendapat suara signifikan dalam proses kandidasi Partai Golkar sehingga berhijrah ke Partai Demokrat.

Pada saat konflik dualisme pemenang Pilkada, Hamid Usman sebagai ketua fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Maluku mengikutinya rapat paripurna yang kedua mendukung keputusan pemenang Pilkada versi Rahmi Husen yang memenangkan Thaib Armaiyn-Gani Kasuba. Hal ini bertentangan dengan keputusan Partai Golkar yang mendukung paket pasangan calon gubernur Abdul Gafur- Rahim Fabanyo. Tindakan Hamid



Usman yang berpindah dukungan ke Thaib Armayn-Gani Kasuba inilah mencuat konflik internal Partai Golkar.

Gejolak politik Partai Golkar yang bisa dibilang fenomena baru karena Partai Golkar Maluku Utara termasuk partai yang solid semakin kuat perbedaan dalam partai semakin memperlihatkan keharmonisan partai. Terlepas dari adanya fenomena elit yang suka berpindah partai karena alasan pragmatisme pada momentum Pemilu atau Pilkada. Tetapi tidak pernah terjadi perpindahan elit pada proses penetapan pemenang Pilkada dari partai A ke partai B seperti yang terjadi pada Partai Golkar Provinsi Maluku Utara dalam pilkada yang berlangsung 2007 hingga 2008. Hal ini terindikasi bahwa adanya konflik internal Partai Golkar yang tidak dapat di kelola dengan baik sehingga terjadinya fragmentasi elit partai.

Fenomena politik Partai Golkar diatas, peneliti tertarik untuk melihat faksionalisme internal Partai Golkar di Maluku Utara pada 2007-2008 yang terjadi pada saat proses pilkada gubernur berlangsung. Bahwa adanya perpindahan elit Partai Golkar yaitu sekretaris Partai Golkar yang juga menjabat sebagai ketua fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Maluku Utara pada saat proses penetapan pemenang pilkada ke kandidat gubernur Partai Demokrat. Diketahui kandidat dari Partai Demokrat, yaitu; Thaib Armayin adalah elit Partai Golkar yang kalah dalam proses kandidasi gubernur Partai Golkar 2007.

Sejumlah penelitian tentang Partai Golkar di akar rumput juga dijadikan bahan melihat perbedaan dengan penelitian yang dibahas dalam paper ini. Jusdin Puluhulawa, Budi Winarno dan Riswanda Imawan melakukan penelitian tentang mekanisme kepemimpinan Partai Golkar dalam rekrutmen kader pada 1996 di Gorontalo. Penelitian ini ingin melihat mengapa rekrutmen kader masih didominasi oleh generasi tua dan mengabaikan generasi muda yang pada hakekatnya merugikan proses regenerasi dalam tubuh Partai Golkar. Kajian ini melihat Partai Golkar sebagai partai politik yang menjalankan fungsi-fungsi partai politik karena pada saat itu Partai Golkar dianggap telah melakukan fungsi partai politik. Kader yang dimaksud adalah OKP, AMPI, KOSGORO, Soksi, Pemuda Pancasila, FKPPi, Pemuda Pancamarga, dan KNPI. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme rekrutmen kader di Kotamadya Gorontalo masih dipengaruhi oleh jalur A dan B dibandingkan jalur G.

Proses kaderisasi pun masih bersifat tertutup tanpa memberikan peluang bagi generasi muda sehingga berdampak pada sifat irasional kaum muda karena tidak diakomodir dalam proses recruitment kader partai. Proses rekrutmen pun mempunyai persyaratan yang ketat (formal dan informal) seperti keseimbangan antara kualitas dan pengaruh, kriteria PDLT, dan hubungan partikularistik. Syarat ini secara subyektif mempengaruhi proses rekrutmen bagi generasi muda.

Kemudian Zahra Ika dalam skripsinya membahas tentang survival Partai Golkar Kota Yogyakarta (Rahmawati, 2005). Tulisan ini menelusuri faktor-faktor apa saja yang dimunculkan oleh Partai Golkar dalam usaha untuk beradaptasi dengan perubahan format pemilu dan sistem kepartaian pasca rezim orde baru. Ika menyatakan bahwa survive-nya Partai Golkar di Kota Yogyakarta disebabkan pada faktor: 1) Pada setiap pemilu Golkar selalu menggunakan strategi milik *cacth-all party* bahwa Partai Golkar tidak mempunyai ideologi dalam menarik suara setiap golongan. Hal ini ditandai dengan jurkam yang mengajak warga NU dan Muhammadiyah. 2) Partai Golkar selalu memunculkan isu yang sifatnya pragmatis seperti perbaikan ekonomi atau pembangunan. 3) Menggunakan simbol dan keberadaan Keraton untuk memperluas basis masa karena perasaan “Wong Jogja” dapat menerjang celah-celah sosial yang berbasis pada agama atau ideologi.

Selain penelitian Ika tentang survive Partai Golkar pasca Orde Baru, Hikmawati (2006) dalam tesisnya membahas tentang Partai Golkar dan perempuan di Sulawesi Selatan (Sulsel). Penelitian ini melihat bagaimana proses rekrutmen perempuan dalam kepengurusan di DPD I Partai Golkar Provinsi Sulsel dan bagaimana posisi perempuan dalam kepengurusan DPD I Partai Golkar Sulsel. Menurut Hikmawati, Partai Golkar adalah partai eksklusif di mata perempuan karena dalam rekrutmen kepengurusan belum banyak memberikan tempat bagi perempuan. Proses rekrutmen pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel lebih mengutamakan loyalitas terhadap organisasi dibandingkan *compartmentalization* (latar belakang pendidikan dan *social background*), *meritocratic* (kompetisi, kompetensi), dan survival (etnis, keluarga). Walaupun dalam peraturan partai tidak memomorduakan perempuan, tetapi pada kenyataannya rekrutmen perempuan masih sangat minim. Hal ini juga terjadi pada rekrutmen anggota caleg dari Partai Golkar.

Ketiga penelitian tentang Partai Golkar diatas, melihat proses rekrutmen kader pada masa Orde Baru yang melihat posisi generasi muda dalam tubuh Partai Golkar, survival Partai Golkar dalam menghadapi perubahan sistem politik pasca Orde Baru dan terakhir melihat posisi perempuan dalam Partai Golkar yang berkaitan dengan proses rekrutmen kepengurusan di DPD I. Kajian-kajian ini berbeda dengan kajian Partai Golkar yang akan peneliti sajikan dalam paper ini. Penelitian ini melihat fenomena kubu atau kelompok yang terbentuk dalam tubuh Partai Golkar tidak pada ranah nasional yang sering dibicarakan para peneliti ilmu politik, tetapi pada Partai Golkar di ranah lokal. Tepatnya peneliti ingin melihat fenomena pembentukan kelompok-kelompok (faksionalisme) serta identifikasi karakteristik faksi dalam Partai Golkar yang muncul pada pilkada di Maluku Utara 2007.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif riset yang mengeksplorasi fenomena faksionalisme Partai Golkar sehingga peneliti dapat menjelaskan mengapa faksi bisa terjadi dan bagaimana karakteristik faksi yang terjadi di internal Partai Golkar. Data diperoleh dari penelusuran dokumen, observasi, dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang dianggap penting dalam penelitian tentang fenomena faksionalisme internal Partai Golkar. Cara menganalisa data diinterpretasi dalam bentuk deskriptif atau uraian untuk penarikan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ada beberapa faktor yang dapat dijelaskan mengapa faksionalisme terjadi di internal Partai Golkar pada saat pilkada gubernur Maluku Utara 2007 yaitu:

### **1. Kepentingan Politik Elit Partai**

Wacana awal rekrutmen politik yaitu pencarian calon gubernur dari Partai Golkar, bahwa Partai Golkar akan mengusung Thaib Armayn sebagai calon gubernur. Kontestasi para elit Partai Golkar pun muncul dengan adanya keinginan untuk dipaketkan dengan Thaib Armayn. Kontestasi kepentingan elit atas posisi politik ini disinyalir pada elit yang

duduk pada pos-pos penting Partai Golkar, yaitu; Yamin Tawari sebagai Korwil Partai Golkar Maluku dan juga sebagai wakil dari DPP Partai Golkar, Syamsir Andili sebagai penasehat DPD II Partai Golkar Kota Ternate yang juga sebagai walikota Ternate dan Hasan Doa sebagai ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara. Dari ketiga elit ini, Hasan Doa yang dihubungi oleh Thaib Armayn dan membicarakan proses pencalonan beliau sebagai pendamping Thaib Armayn. Dari proses inilah awal terjadinya keretakan elit, Syamsir Andili yang mulanya mendukung pencalonan Thaib Armayn berbalik arah mendukung Abdul Gafur dan didukung oleh Korwil Partai Golkar. Disinilah awal keretakan para elit Partai Golkar sehingga berdampak pada pembentukan faksi yang begitu tajam di tubuh Partai Golkar. Tetapi seiring waktu berjalan, Thaib Armayn berhalangan hadir dalam setiap pemanggilan ketua umum Partai Golkar sehingga partai dalam hal mempertahankan harga diri partai membuat keputusan untuk mendukung Abdul Gafur.

## **2. Budaya Klientalisme: Patron-klien**

Konvensi merupakan ajang rekrutmen politik untuk memilih calon gubernur dari Partai Golkar. Orang yang akan memilih sosok yang akan tampil sebagai pemimpin akan memperhitungkan kedekatan pada sosok pemimpin yang akan tampil karena hal ini untuk menjamin keberlangsungan hidup orang tersebut dalam politik. Hamid Usman adalah sosok yang dekat dengan Thaib Armayn karena sama-sama berkecimpung dalam organisasi Kosgoro 57 dan kedekatan antara mereka telah berlangsung dari 1968 sampai sekarang. Thaib Armayn dan Hamid Usman masih berada pada organisasi Kosgoro 57. Kedekatan hubungan ini yang menjadi salah satu pemicu terbentuknya faksi yang mendukung Thaib Armayn. Diketahui bahwa faksi ini dipimpin oleh Hamid Usman. Betapa pentingnya kedekatan emosional antara Thaib Armayn dan Hamid Usman dengan pertimbangan penting bahwa jika Thaib Armayn yang akan memenangkan konvensi posisi Hamid Usman akan aman dalam politik dan juga Partai Golkar pun akan mendapatkan posisi aman dalam politik pemerintahan. Sehingga pembelaan Hamid Usman akan sosok Thaib Armayn sangat gentar dengan melawan keputusan partai secara terbuka sampai pada proses pilkada, Hamid tetap kukuh membela Thaib

Armayn atas nama Partai Golkar. Perlawanan ini kemudian mendapat teguran yang keras dari pimpinan partai dengan dipecatnya Hamid Usman dari Partai Golkar.

Faktor yang memicu pembentukan faksi internal Partai Golkar, para pendukung kedua tokoh ini kemudian bersaing dengan membentuk kubu atau faksi untuk bersaing pada saat konvensi internal Partai Golkar untuk memilih kandidat gubernur Maluku Utara periode 2008-2013. Tetapi pada akhirnya Abdul Gafur yang terpilih menjadi kandidat yang dipilih Partai Golkar untuk maju di Pilkada gubernur.

Fenomena faksi yang terjadi, peneliti menyimpulkan beberapa karakteristik faksi yang terjadi di internal Partai Golkar, yaitu:

- a. *Cligues and Tendencies*, faksi merupakan kelompok kecil yang berada di dalam partai politik dan memperlihatkan tingkat organisasi yang minim. Faksi tipe ini adalah faksi yang dibentuk oleh mereka yang mendukung Abdul Gafur. Aktor-aktor yang ada di dalam faksi ini dengan secara tiba-tiba membentuk suatu kelompok untuk mendukung Abdul Gafur yang sebelumnya membuat faksi-faksi tersendiri dalam partai. Ketika perdebatan antara kedua tokoh fenomenal (Thaib dan Gafur), kelompok ini kemudian bersatu membentuk kekuatan untuk melawan kelompok yang mendukung Thaib Armayn. Kubu Hamid Usman adalah kelompok yang memang sebelum konvensi telah mendukung Thaib Armayn karena beliau termasuk dalam organisasi Kosgoro 57 yaitu sebagai penasehat Kosgoro 57.
- b. *Personal, client-group faction*, faksi yang dibuat menurut selera dan kepentingan berdasarkan klientalisme adalah faksi Hamid Usman. Kedekatan personal antara Hamid dan Thaib Armayn dalam ikatan organisasi Kosgoro membuat Hamid sangat ngotot atas pencalonan Thaib sebagai calon gubernur dari Partai Golkar. Dalam hal ini, faksi Hamid Usman bersifat partikularistik. Asumsi dasar adalah Hamid akan mendukung Thaib Armayn sebagai kepala daerah dari Partai Golkar karena sama-sama berkecimpung dalam organisasi Kosgoro dan tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan Hamid Usman untuk tetap eksis dalam partai politik. Sekalipun Hamid Usman di-*recall* dari Partai Golkar, tetapi Hamid masih tetap eksis dan menjadi orang penting di Partai Demokrat.

## KESIMPULAN

Faksi internal Partai Golkar terbentuk pada saat pemilihan kepala daerah langsung Maluku Utara pada 2007 disebabkan oleh beberapa dua faktor. *Pertama*, pragmatis elit Partai Golkar. Ada beberapa kepentingan politik elit yang menyebabkan terbentuknya faksi: (1) Pada kenyataan, faktor pragmatis kepentingan elit Partai Golkar dilihat pada awal perdebatan siapa yang akan digandeng oleh Thaib Armayn sebagai wakil gubernur. Tiga elit yang sangat berpengaruh di Partai Golkar Maluku Utara, yaitu Hasan Doa sebagai ketua DPD I Partai Golkar, Yamin Tawari Koordinator Wilayah XV Maluku dan Syamsir Andili sebagai Ketua Dewan Penasehat DPD II Partai Golkar Kota Ternate. Ketiga elit ini berkeinginan untuk maju sebagai calon gubernur pendamping Thaib Armayn, tetapi pada kenyataannya Thaib Armayn menghubungi ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara untuk menjadi calon wakil gubernur. Syamsir Andili yang pertamanya mendukung Thaib Armayn berubah arah untuk mendukung Abdul Gafur. Begitupun dengan Yamin Tawari yang bersatu dengan Syamsir Andili untuk mendukung Abdul Gafur dalam konvensi sebagai calon kepala daerah dari Partai Golkar. Masalah inilah kemudian terbentuknya faksi di dalam tubuh Partai Golkar yang dibawa oleh para elit; (2) Konsistensi Hamid Usman untuk mendukung Thaib Armayn dari sebelum konvensi sampai pada akhir pilkada menunjukkan pragmatis elit. Tindakan Hamid Usman yang tereskalasi pada saat pilkada membuat konflik antara faksi semakin rumit. Faksi Hamid cs berhadapan dengan faksi Syamsir Andili pada saat pilkada polemik antara kedua faksi ini berakhir dengan pemecatan Hamid Usman dari Partai Golkar karena dianggap melanggar keputusan Partai Golkar yang mendukung Abdul Gafur-Rahim Fabanyo. Akhir dari pilkada, faksi Hamid Usman dan Faksi Hasan Doa berpindah ke Partai Demokrat yaitu partai pengusung Thaib Armayn dalam pilkada.

*Kedua*, hubungan patron-klien. Hubungan klientalisme di sini berdasarkan kedekatan emosional antara Hamid Usman dan Thaib Armayn yang telah lama hidup dalam organisasi pendiri Partai Golkar Kosgoro 57. Kedekatan mereka inilah yang memicu tindakan Hamid Usman yang gigih memperjuangkan Thaib Armayn di Partai Golkar bahkan keputusan Partai Golkar pun diterobos dengan berbagai cara

hanya untuk memperjuangkan Thaib sebagai calon gubernur dari Partai Golkar. Tindakan Hamid ini cenderung bersifat partikularistik. Asumsinya Hamid akan selalu berada mendukung Thaib yang berada bersamanya di Kosgoro bukan hanya kedekatan emosional tetapi adanya kepentingan politik. Dari faktor inilah terbentuk faksi Hamid Usman yang secara terang-bederang mendukung Thaib dari awal konvensi sampai pada akhir pilkada gubernur.

Sedangkan karekteristik faksionalisme internal Partai Golkar Maluku Utara dapat dilihat dari:

*Pertama*, fragmentasi faksi internal Partai Golkar pecah menjadi dua kubu (bipolar), yaitu kubu pendukung Abdul Gafur dan kubu pendukung Thaib Armayn. Terjadi pemilihan dua kubu besar untuk mendukung dua bakal calon gubernur dari Partai Golkar yaitu kubu pendukung Thaib dan kubu pendukung Gafur. Masing-masing kubu ini mempunyai alasan mengapa mendukung Thaib dan mengapa mereka mendukung Gafur. Alasan-alasan yang diutarakan oleh pendukung Thaib adalah bahwa Thaib merupakan tokoh pemenang survey elektabilitas calon gubernur. Jadi, jika Partai Golkar ingin menang dalam pilkada, partai ini harus mendukung Thaib dan ini sesuai dengan amanat Juklak 05 yaitu partai harus mengakomodir tokoh yang menang dalam survey yang diadakan selama dua kali. Hal ini timbul masalah di kalangan pendukung Gafur bahwa Partai Golkar harus memperhitungkan kader murni Partai jika ada kader murni partai kenapa pilih yang lain. Alasan mereka yang mendukung Gafur adalah bahwa Maluku Utara perlu perubahan. Tidak ada orang lain selain Abdul Gafur seorang putra daerah yang telah mapan dalam politik nasional.

*Kedua*, institusionalisasi faksi yang dibentuk karena selera dan kepentingan para aktor Partai Golkar termasuk dalam faksi yang tingkat kelembagaannya cukup tinggi. Tingkat kelembagaan faksi Hamid Usman merupakan faksi yang cukup terlembaga dilihat dari pola manuver Hamid Usman pada saat pilkada yang melanggar keputusan Partai Golkar secara terang-terangan. Faksi Hamid Usman cukup terlembaga menurut kepentingan yang dibawa oleh faksi ini.

*Ketiga*, polarisasi faksi memperlihatkan dinamika konflik yang terus meningkat dilihat dari momen menjelang konvensi sampai pada pasca

pilkada. Konflik internal Partai Golkar menjadi konflik terbuka karena tindakan Hamid Usman yang melanggar keputusan Partai Golkar dengan mendukung Thaib Armayin di depan Mendagri dan mengatasnamakan Partai Golkar. Karena tindakan ini Hamid dipecat dari Partai Golkar dan tanpa melewati proses pemecatan. Hasilnya Hamid berpindah ke Partai Demokrat dan mendukung Thaib sebagai calon gubernur Maluku Utara yang diikuti oleh para anggotanya yang pada saat konvensi berada di barisan Hamid untuk mendukung Thaib Armayin. Faksi Hamid Usman bersifat sentrifugal yaitu faksi menyimpang dari ketentuan partai. Hal ini berdampak pada disintegrasi partai di mana konflik internal partai berefek pada pemecatan Hamid Usman dan perpindahan elit Partai Golkar yang ada di belakang Hamid Usman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul. 1996. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Tiara Wacana. Yogyakarta
- Ambong, Ibrahim. 1990. *Journal Ilmu Politik 4, Memahami Keberdadaan Golkar*. PPW dan LIPI, Gramedia. Jakarta
- Beller, Dennis, C, Belloni, Frank, P. 1978. *Party and Faction: Modes of Political Competition*. in: Belloni, Frank, P, Beller, Dennis, C.
- Belloni, Frank, P, and Beller, Dennis C., eds. 1978. *Faction Politics: Political Parties and Factionalism in Comparative Perspective*. Santa Barbara. Clio Press
- Cahyono, Hari, Chepy. 1991. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Tiara Wacana. Yogyakarta
- Carty, R. Kenneth. 2004. *Parties as Franchise System, the Stratarchical Organizational Imperative in Party Politics*
- Castle, Lance. 2004. *Pemilu 2004 dalam Konteks Komparatif dan Historis*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Denzin, Norman K. & Guba, Egon. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. PT. Tiara. Yogyakarta
- Dhakidae, Daniel. 1999. *Partai-partai Politik, Demokrasi, dan Oligarki*. Litbang Kompas. Jakarta
- Duverger, Maurice. 1984. *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*. Bina Aksara. Yogyakarta



- Evans, Raymond, Kevin. 1997. *Sejarah Pemilu dan Partai Politik Indonesia*. PT. Aries Consultancies. Jakarta
- Haryanto. 1984. *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*. Liberty. Yogyakarta
- J. Vredenberg. 1985. *Pengantar Metodologi Ilmu-ilmu Empiris*. PT. Gramedia. Jakarta
- Katz, Richard and Crotty, William. 2006. *Handbook Of Party Politics*. SAGE Publications. London
- Key Jr., V. O. 1984. *Southern Politics in State and Nation*. A New Edition, Knoxville: University of Tennessee Press
- Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Kollner, Patrick and Basedau, Matthias. 2005. *Factionalism in Political Parties: An Analytical Framework for Comparative Studies*. German Overseas Institute (DUI), Hamburg
- Maor, Moshe. 1997. *Political Parties and Party System, Comparative Approaches and the British Experience*. London and New York, Routledge
- Michels, Robert. 1984. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*. Rajawali. Jakarta
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda. Bandung
- Muller-Rommel. 1982. *Innerparteiliche Gruppierungen in der SDP*. Opladen Westdeutscher Verlag
- Oesman, Oetoyo. 2000. *Kelembagaan Partai Golkar dalam Basis-basis Kekuatan Partai (Power Bases) sebagai Hubungan Fungsional antar-Lembaga, dalam Golkar Abad XXI*. LASPI. Jakarta
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. JIP UGM. Yogyakarta
- Pandiangan, Andreas. 1996. *Menggugat Kemandirian Golkar*. Bigraf Publishing. Yogyakarta
- Poguntke, Thomas. 2002. *Parties without Firm Social Roots? Party Organizational Linkage*
- Prihatmoko, J, Joko. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. LP2L Press. Semarang
- Reeve, David. 1985. *Golkar Of Indonesia: An Alternative to the Party System*. Oxford University Press. Singapore
- Sartori, Giovanni. 1976. *Parties and Party System: A Framework for Analy-*

- sis. Volume I. Cambridge University Press
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1995. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta
- Stanley, Editor. 1999. *Golkar Retak, Intrik Politik Golkar*. Institut Studi Arus Informasi. Jakarta
- Tandjung, Akbar. 2007. *The Golkar Way*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Tim LIPI (2007). *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi Indonesia*. LIPI. Jakarta
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo S. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta
- Zariski, Raphael. 1960. *Party Factions and Comparative Politics: Some Preliminary Observations*, in: *Midwest Journal of Political Science*